

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik modern. Konsep ini lahir dari pemahaman bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan gender tidak hanya berbicara mengenai perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sistem sosial, budaya, serta kebijakan publik mampu memberikan ruang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya kesetaraan gender, setiap individu diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis dan inklusif.

Salah satu permasalahan yang masih banyak dihadapi perempuan dalam dunia politik adalah adanya berbagai hambatan struktural yang membatasi ruang gerak mereka untuk berpartisipasi secara optimal. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem politik, budaya organisasi partai, serta konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Mhd. Latip Kahpi, 2024).

Dalam kajiannya mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghambat utama keterlibatan perempuan dalam politik. Faktor-faktor tersebut meliputi struktur partai politik yang belum sepenuhnya memberikan ruang yang ramah bagi perempuan, kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar dalam kehidupan sosial, beban ganda yang harus ditanggung perempuan dalam menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan, serta masih terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan dan penguatan kapasitas politik. Berbagai hambatan tersebut

secara tidak langsung menyebabkan perempuan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan laki-laki ketika ingin terlibat dalam aktivitas politik maupun menduduki jabatan strategis dalam organisasi politik.

Selain hambatan yang bersifat struktural, perempuan juga masih menghadapi hambatan kultural yang berasal dari cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan. Hingga saat ini masih terdapat stereotip yang menganggap bahwa perempuan lebih cocok menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga dibandingkan berperan di ruang publik, termasuk dalam bidang politik. Pandangan seperti ini membuat suara dan pendapat perempuan sering kali kurang mendapat perhatian dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, perempuan tidak selalu memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat secara aktif dalam proses politik maupun dalam perumusan kebijakan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan bukan hanya berkaitan dengan jumlah perempuan yang hadir dalam lembaga politik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana perempuan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan [memengaruhi keputusan yang diambil.

Dalam konteks politik Indonesia, upaya untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif telah dilakukan melalui berbagai kebijakan afirmatif yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penerapan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif maupun dalam kepengurusan partai politik. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, (Indonesia, 2017) tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Selain itu, komitmen negara terhadap peningkatan partisipasi perempuan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus melibatkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan. Kebijakan ini menunjukkan adanya keseriusan negara dalam membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi perempuan (RI, 2011).

laki. Sementara itu, perempuan umumnya ditempatkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan urusan internal organisasi, pemberdayaan perempuan, atau pengembangan kader. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan strategis partai menjadi relatif terbatas dan pengaruh mereka terhadap arah kebijakan organisasi belum sepenuhnya optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kuota minimal 30 persen perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif belum sepenuhnya mampu menghasilkan Representasi substantif. Dalam banyak kasus, pemenuhan kuota masih dilakukan sebatas memenuhi ketentuan administratif tanpa disertai upaya yang serius untuk memberikan akses terhadap posisi strategis dan sumber daya politik yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Menurut Hanna Pitkin, representasi deskriptif berkaitan dengan kehadiran kelompok tertentu dalam lembaga politik yang diukur berdasarkan jumlah atau proporsi keterwakilan (Pitkin, 1967).

Dalam konteks ini, keberhasilan perempuan sering kali dinilai dari terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan dalam suatu lembaga atau organisasi politik. Sementara itu, representasi substantif menekankan kemampuan wakil untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya melalui tindakan nyata dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan keterwakilan perempuan tidak hanya diukur dari jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, tetapi juga dari sejauh mana perempuan memiliki pengaruh terhadap proses dan hasil pengambilan keputusan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, berbagai partai politik di Indonesia telah berupaya menerapkan kebijakan keterwakilan perempuan dalam struktur organisasinya. Kebijakan ini diwujudkan melalui penerapan kuota minimal 30 persen keterwakilan Perempuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Indonesia., 2011), sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Kehadiran perempuan dalam struktur partai politik diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan kuota perempuan menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong keterlibatan perempuan yang lebih luas dalam kehidupan politik nasional.

Dalam praktiknya, sejumlah partai politik di Indonesia telah memasukkan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan ke dalam aturan internal partai. Beberapa partai politik seperti PPP, PKS, PAN, dan PKB telah mengatur ketentuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Namun, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa perempuan memperoleh posisi yang strategis dalam struktur organisasi partai. Pada kenyataannya, perempuan sering kali hanya dilibatkan dalam fungsi-fungsi administratif atau bidang yang berkaitan dengan urusan perempuan dan kaderisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kuota secara formal belum selalu diikuti dengan peningkatan kualitas keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan partai (Juwita Hayyuning Prastiwi1, 2024).

Tabel 1 Jumlah Pengurus Perempuan Setiap Partai

Partai	Jumlah Pengurus	Jumlah Perempuan	Persentase
PKB	79	24	30,38%
NasDem	73	22	30,14 %
PPP	94	21	22,34%
PKS	70	9	12,86%
PAN	44	9	20,45%

Sumber data dari : SK Kepengurusan setiap partai

Partai NasDem telah menerapkan kebijakan afirmasi gender sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan termasuk pemenuhan kuota minimal 30 persen dalam struktur kepengurusan partai perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pemilu 2019 dan 2024 menjadi catatan tersendiri bagi Partai NasDem. Walaupun Partai NasDem adalah salah satu partai politik yang

relatif baru dalam dunia politik Indonesia pasca-reformasi. Partai ini secara resmi didirikan pada tanggal 26 Juli 2011 dan dideklarasikan sebagai partai politik nasional pada 11 November 2011 di Jakarta, dengan Surya Paloh sebagai tokoh sentral pendirinya. Selain berhasil duduk di peringkat empat besar perolehan kursi DPR RI periode 2019-2024, sebanyak lebih 30% anggota Perempuan di DPR RI terpilih dari NasDem (KPU, 2024).

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2024–2029 terdiri dari 73 orang pengurus, dengan 22 di antaranya adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur DPP Partai NasDem mencapai sekitar 30,14%. Capaian tersebut menandakan bahwa Partai NasDem telah memenuhi ambang batas afirmasi minimal 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai di tingkat pusat. Namun demikian, pemenuhan secara kuantitatif ini perlu dilihat lebih jauh apakah juga diikuti oleh keterlibatan substantif perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis partai (Rassat, 2024). Untuk memahami lebih lanjut terkait struktur DPP, berikut data terkait struktur kepengurusan DPP Partai NasDem.

Gambar 1 Struktur DPP Partai NasDem



Sumber: (Rassat, 2024)

Meskipun Partai NasDem telah berkomitmen melaksanakan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan secara formal, dalam praktiknya perempuan sering kali terjebak pada peran yang lebih simbolik dan administratif, sehingga pengaruh mereka dalam membentuk kebijakan partai masih terbatas. Di sisi lain,

stereotip dan budaya patriarki ini membuat perempuan yang ingin berperan aktif harus berjuang lebih keras untuk membuktikan kapasitas dan kompetensi mereka. Dalam lingkungan politik yang masih didominasi nilai patriarki, perempuan perlu memperkuat jaringan serta membangun strategi yang cermat untuk bisa menembus pengambilan keputusan partai. Mereka juga berperan penting dalam membuka ruang diskusi dan perlawanan terhadap stereotip yang melekat agar perlahan bisa menciptakan budaya politik yang lebih inklusif dan setara. Partai NasDem sebagai salah satu pelopor dalam mendorong keterlibatan perempuan memang membuka peluang, namun proses perubahan budaya patriarki dalam internal partai masih memerlukan waktu dan kerja keras dari seluruh pihak.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa keberhasilan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum tentu mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan Representasi perempuan yang substantif. Dalam banyak kasus, perempuan memang telah hadir dalam struktur organisasi partai politik, Sebagai contoh Perempuan dalam kepengurusan internal NasDem sendiri sudah mencapai 30 persen keterwakilannya (Lisa, 2022), tetapi belum tentu memiliki akses yang sama terhadap posisi strategis maupun kewenangan dalam menentukan kebijakan partai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara representasi secara formal dengan representasi yang benar-benar memberikan pengaruh dalam proses politik.

1.2 Rumusan Masalah

Sistem politik Indonesia secara umum masih belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali utama dalam urusan publik dan politik. Budaya semacam ini secara tidak langsung membentuk cara pandang di dalam organisasi partai, termasuk dalam hal siapa yang dianggap layak dan kompeten untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Di banyak partai politik, termasuk NasDem, perempuan seringkali harus membuktikan diri lebih keras dibandingkan rekan laki-lakinya untuk mendapatkan kepercayaan yang setara dalam forum-forum penting partai (Ramdhani, 2021). Situasi ini bukan semata-mata soal diskriminasi yang bersifat terbuka, melainkan

lebih kepada pola-pola yang sudah mengakar dalam budaya organisasi dan cara kerja internal partai yang secara tidak sadar masih mereproduksi ketimpangan gender. Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi sejauh mana budaya internal partai di DPP NasDem turut memengaruhi ruang gerak perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Berangkat dari permasalahan rendahnya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis pengambilan keputusan di internal partai politik serta kuatnya budaya patriarki dalam praktik politik, dinamika di lingkungan Partai NasDem menunjukkan wajah yang relatif berbeda. NasDem secara terbuka mendorong partisipasi perempuan melalui kebijakan afirmatif dan rekrutmen kader perempuan, sekaligus membangun narasi bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena posisi strategis di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masih didominasi oleh elit laki-laki.

Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan inti partai masih terbatas. Penelitian dari (Effendi, 2019) menunjukkan bahwa perempuan di struktur DPP Partai NasDem umumnya ditempatkan pada jabatan yang tidak strategis dan belum berada di lingkaran utama pengambil keputusan, sehingga kebijakan afirmatif yang telah ditetapkan lebih banyak bersifat administratif dan belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara komitmen normatif terhadap kesetaraan gender dengan realitas praktik politik di internal partai.

Menurut (Mhd. Latip Kahpi, 2024) masih terdapat kecenderungan yang menempatkan perempuan pada peran-peran yang dianggap dekat dengan urusan domestik, emosional, dan sosial kemasyarakatan, sementara posisi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa masih terdapat bias gender yang memengaruhi distribusi jabatan dalam organisasi politik. Akibatnya, perempuan sering kali mengalami kesulitan untuk membuktikan kapasitas dan kompetensi mereka sebagai pemimpin politik. Situasi ini menjadi tantangan yang penting untuk

dikaji karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem politik Indonesia. Dengan memahami hambatan-hambatan tersebut, dapat diketahui berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik sehingga dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan peran perempuan di masa mendatang.

Melihat kondisi yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar soal jumlah atau kuota yang terpenuhi, melainkan tentang seberapa jauh suara dan pendapat mereka benar-benar didengar dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Di Partai NasDem sendiri, meskipun secara struktural perempuan sudah ditempatkan dalam berbagai posisi kepengurusan di DPP, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan pengaruh nyata yang mereka miliki. Hal ini menjadi pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara lebih mendalam, yaitu apakah posisi formal yang dipegang perempuan di DPP NasDem sudah cukup untuk menjadikan mereka aktor yang benar-benar menentukan arah kebijakan partai, atau justru mereka masih berada di pinggiran proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Kondisi ini yang kemudian mendorong penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh dinamika peran perempuan di lingkungan internal DPP Partai NasDem secara lebih substantif.

Hal yang tidak kalah penting untuk ditelaah adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di dalam forum-forum resmi DPP NasDem itu sendiri berjalan. Dalam rapat pleno maupun Rakernas, proses musyawarah dan pengambilan suara menjadi arena di mana berbagai kepentingan dan pandangan diperjuangkan. Namun, dinamika di balik forum resmi tersebut tidak selalu mudah dibaca dari luar, karena keputusan-keputusan besar seringkali sudah dibentuk melalui diskusi dan lobi informal sebelum masuk ke forum resmi (Jabar, 2022). Dalam konteks inilah, posisi perempuan menjadi krusial untuk dikaji, karena akses terhadap ruang-ruang informal tersebut sangat bergantung pada jaringan, kepercayaan, dan kedekatan dengan elite partai yang masih didominasi oleh laki-laki.

Jika perempuan tidak memiliki akses yang memadai terhadap ruang-ruang informal itu, maka kehadiran mereka dalam forum resmi pun tidak akan banyak mengubah hasil akhir keputusan yang diambil. Pemahaman tentang mekanisme inilah yang menjadi salah satu titik fokus analisis dalam penelitian ini. perempuan menempati sejumlah posisi strategis pada tingkat ketua bidang yang memiliki fungsi dalam perumusan program, kaderisasi, advokasi isu publik, serta pengembangan organisasi. Adapun pengurus perempuan yang menjabat sebagai Ketua Bidang di DPP Partai NasDem periode 2024–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Pengurus Perempuan DPP Partai NasDem Periode 2024–2029

No.	Nama	Jabatan
1	Millie Stephanie Lukito	Ketua Bidang Ekonomi
2	Irma Suryani Chaniago	Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Okky Asokawati Padmodimuljo	Ketua Bidang Kesehatan
4	Amelia Anggraini	Ketua Bidang Perempuan dan Anak
5	Ratu Ngadu Bonu Wulla	Ketua Bidang Maritim
6	Lusyani Suwandi	Ketua Bidang Lingkungan Hidup
7	Nining Indra Shaleh	Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik
8	Eva Sundari	Ketua Bidang Migran
9	Rosita Usman	Ketua Bidang Pembangunan dan Infrastruktur
10	Lathifa M. Al Anshori	Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Kepengurusan DPP Partai NasDem Periode 2024–2029.

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya ditempatkan pada bidang yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak, tetapi juga dipercaya memimpin bidang-bidang yang berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan, maritim, lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur,

kaderisasi politik, hingga pengembangan basis pemilih muda. Kondisi ini mengindikasikan adanya upaya Partai NasDem untuk memperluas keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor strategis organisasi. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan struktur kepemimpinan puncak partai yang masih didominasi oleh laki-laki, keberadaan perempuan pada tingkat ketua bidang belum secara otomatis menunjukkan adanya distribusi kekuasaan yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut sejauh mana pengurus perempuan tersebut memiliki akses dan pengaruh nyata dalam forum-forum pengambilan keputusan partai, baik melalui mekanisme formal maupun melalui proses komunikasi dan koordinasi informal yang berlangsung di internal organisasi.

Meskipun secara struktur kepengurusan DPP Partai NasDem periode 2024 perempuan telah memenuhi ketentuan keterwakilan minimal 30 persen, hal tersebut belum secara otomatis menunjukkan kuatnya pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan strategis partai. Sepanjang tahun 2024, beberapa keputusan penting. Partai NasDem antara lain penetapan arah kebijakan hasil Kongres III Partai NasDem, penyusunan kepengurusan DPP periode 2024–2029, konsolidasi organisasi nasional, serta penentuan strategi politik menghadapi Pemilu dan Pilkada. Dalam berbagai proses tersebut, keterlibatan perempuan umumnya terlihat melalui keikutsertaan dalam forum rapat, pemberian usulan, maupun pelaksanaan program partai. Namun, figur-figur yang menempati posisi sentral dalam pengambilan keputusan akhir masih didominasi oleh elite laki-laki, seperti Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan jajaran pimpinan utama partai. Dengan demikian, perempuan telah memperoleh ruang partisipasi dalam proses perumusan kebijakan internal partai, tetapi belum sepenuhnya terlihat sebagai aktor dominan yang menentukan hasil akhir keputusan strategis organisasi.

Salah satu contoh keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan Partai NasDem dapat dilihat pada pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 yang menjadi forum penjangkaran bakal calon presiden. Dalam Rakernas tersebut muncul nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang berasal dari usulan DPW di berbagai daerah. Sebagian usulan tersebut juga disampaikan oleh kader perempuan yang terlibat dalam kepengurusan DPW. Selain

itu, Lestari Moerdijat menjadi satu-satunya tokoh perempuan yang memperoleh dukungan sebagai bakal calon presiden. Berdasarkan hasil rekapitulasi usulan DPW, namanya diusulkan oleh enam DPW, termasuk DPW DKI Jakarta dan DPW Sulawesi Tengah (Hakim, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses penjangkaran kepemimpinan nasional partai.(Hakim, 2022).

Kondisi ini menunjukkan adanya ruang bagi kader perempuan untuk tampil dalam proses penjangkaran kepemimpinan nasional partai. Namun, masih muncul pertanyaan penting, yaitu seberapa besar pendapat perempuan benar-benar memengaruhi keputusan akhir yang ditetapkan oleh DPP Partai NasDem. Dalam rapat internal partai yang dilakukan oleh partai NasDem peran perempuan juga terlihat dari keterlibatan tokoh perempuan di tingkat elit partai, seperti Lestari Moerdijat, anggota Majelis Tinggi DPP NasDem, yang sempat diusulkan oleh DPW Sulawesi Tengah sebagai calon presiden dan aktif dalam berbagai forum serta kegiatan perempuan. Selain itu, Andina Narang sebagai Ketua Umum Garnita Malahayati juga terlibat dalam rapat pleno dan konsolidasi politik internal yang mendukung arah kebijakan partai (tempo, 2024).

Meskipun demikian, keterlibatan perempuan, baik melalui struktur DPP maupun organisasi sayap seperti Garnita Malahayati, masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut berasal dari struktur internal partai serta budaya politik Indonesia yang masih kuat dipengaruhi oleh patriarki dan stereotip gender. Dalam kondisi tersebut, perempuan sering kali dipandang sebagai pelengkap untuk memenuhi prinsip demokrasi dan keterwakilan, bukan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, keterwakilan perempuan di dalam partai cenderung bersifat kuantitatif, namun belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap arah dan hasil kebijakan internal partai.

Partai NasDem sebagai salah satu partai yang secara eksplisit mengusung agenda kesetaraan gender dan bahkan memiliki program khusus untuk memberdayakan perempuan, justru menjadi subjek yang sangat menarik untuk diteliti, karena ada kesenjangan yang perlu diuji antara visi kesetaraan yang diusung partai dengan praktik nyata yang terjadi di level pengambilan keputusan internal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis dalam ranah ilmu politik, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam mendorong refleksi internal partai tentang sejauh mana komitmen mereka terhadap kesetaraan gender benar-benar diwujudkan dalam tata kelola organisasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari Uraian diatas dapat diambil beberapa hal yang penting yang akan diteliti dan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana representasi substantif perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis di DPP Partai NasDem tahun 2024?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di DPP Partai NasDem?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Akademik

Tujuan akademik dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis representasi substantif perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis di lingkungan DPP Partai NasDem tahun 2024.
2. Menganalisis sejauh mana perempuan memiliki pengaruh dalam penyampaian gagasan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis di DPP Partai NasDem.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis di DPP Partai NasDem, baik yang berasal dari faktor organisasi, budaya politik, maupun dinamika internal partai.
4. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam studi representasi politik perempuan, partai politik, dan pengambilan keputusan internal organisasi politik.
5. Menambah referensi ilmiah mengenai representasi substantif perempuan dalam partai politik di Indonesia yang masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat kepengurusan pusat partai politik.

1.4.2. Tujuan Praktis

Adapun Tujuan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan gambaran mengenai posisi dan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis di lingkungan DPP Partai NasDem tahun 2024.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi Partai NasDem dalam memperkuat keterlibatan perempuan pada berbagai forum pengambilan keputusan internal partai.
3. Memberikan masukan bagi partai politik dalam menciptakan lingkungan organisasi yang lebih terbuka dan mendukung keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
4. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat, akademisi, dan pemerhati politik mengenai praktik representasi perempuan dalam struktur kepemimpinan partai politik di Indonesia.
5. Mendorong peningkatan partisipasi dan pengaruh perempuan dalam proses politik, tidak hanya sebagai bentuk keterwakilan secara jumlah, tetapi juga dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan organisasi.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini mengisi kekosongan studi yang mendalam terkait peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat partai politik, khususnya di DPP Partai NasDem. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tema kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan, atau dinamika politik internal partai. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman baru bahwa representasi perempuan tidak hanya harus dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari kualitas dan kapasitas mereka dalam menentukan arah kebijakan politik.

Beberapa penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek kuantitatif keterwakilan perempuan, seperti jumlah perempuan dalam struktur legislatif atau partai, tanpa menelusuri secara rinci bagaimana perempuan berkontribusi secara

aktif dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang lebih kaya dan detail mengenai kualitas keterlibatan politik perempuan. Selain itu, fokus pada dinamika internal partai seperti hambatan budaya patriarki, stereotip gender, serta konflik yang muncul dalam konteks partai politik Indonesia menjadi aspek baru yang menambah pemahaman tentang tantangan struktural yang dihadapi perempuan di ranah politik praktis.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki nilai penting dalam mendorong perubahan kebijakan dan praktik di partai politik maupun lembaga legislatif. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Partai NasDem dan partai politik lain dalam rangka memperkuat posisi perempuan, tidak hanya sebagai pemenuhan kuota administratif tetapi juga sebagai aktor keputusan yang berpengaruh. Dengan bukti-bukti empiris yang dihasilkan, partai dapat mengembangkan strategi dan kebijakan internal yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini menjadi penghalang keterlibatan perempuan, termasuk penguatan kapasitas politik perempuan, perombakan budaya partai yang patriarkis, serta penyediaan sumber daya yang memadai bagi perempuan di posisi strategis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat posisi perempuan dalam dunia politik, khususnya di tingkat partai politik, serta menjadi sumber referensi bagi partai-partai lain dalam mendorong aspek kesetaraan gender dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata tentang bagaimana perempuan di DPP Partai NasDem memainkan peran politik mereka di tengah tantangan sosial budaya dan stereotype yang ada.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian karena berfungsi untuk menempatkan penelitian yang dilakukan dalam konteks kajian ilmiah yang telah berkembang sebelumnya. Melalui penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kekosongan kajian yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu,

peneliti mengkaji beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema representasi perempuan, partisipasi politik perempuan, dan pengambilan keputusan dalam organisasi politik. Berikut disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan dasar pengembangan penelitian ini.

No	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian	Kelemahan Penelitian (Research Gap)
1	(M. Siregar, 2021) Kebijakan Afirmasi dan Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia.” Dalam <i>Jurnal Ilmu Sosial dan Politik</i>	Menganalisis efektivitas kebijakan afirmasi dan kuota 30% perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga politik Indonesia.	Penelitian menunjukkan bahwa kuota perempuan berhasil meningkatkan jumlah perempuan di DPR dan DPRD. Namun, peningkatan tersebut lebih bersifat kuantitatif karena perempuan masih jarang menduduki posisi strategis yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan penting.	Penelitian lebih berfokus pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif secara umum dan belum mengkaji bagaimana perempuan berperan dalam proses pengambilan keputusan di internal partai politik, khususnya pada tingkat kepemimpinan pusat partai.
2	(Hidayati, 2020) Gender dan Politik: Tantangan Keterlibatan Perempuan di Ranah Pengambilan Keputusan” <i>Jurnal Kajian Gender 2020</i>	Mengkaji hambatan yang dihadapi perempuan dalam keterlibatan politik dan pengambilan keputusan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki, stereotip gender, dan beban ganda (double burden) masih menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk	Penelitian lebih menyoroti faktor sosial dan budaya yang memengaruhi perempuan secara umum, namun belum membahas bagaimana hambatan

			berpartisipasi secara optimal dalam dunia politik.	tersebut bekerja dalam struktur organisasi partai politik dan memengaruhi pengambilan keputusan internal partai.
3	(Theresia Parwati, 2020) "Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia" <i>Ejournal.undip.ac.id</i> 2020	Menganalisis partisipasi dan komunikasi politik perempuan di lembaga legislatif Indonesia.	Penelitian menemukan bahwa perempuan cenderung memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi secara langsung dalam forum politik formal sehingga pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan masih relatif rendah dibandingkan laki-laki.	Fokus penelitian berada pada lembaga legislatif dan pola komunikasi politik perempuan. Penelitian ini belum menjelaskan bagaimana komunikasi politik perempuan memengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkungan elite partai politik.
4	(Silkonia Swarizona, 2024) <i>Women's Wings of Organization and Political Representation: Study of Garnita Malahayati's Involvement in the 2019 Legislative Candidate Selection Process</i> <i>Journal.unesa.ac.id</i> 2024	Mengkaji keterlibatan organisasi sayap perempuan dalam proses seleksi calon legislatif melalui studi pada Garnita Malahayati.	Penelitian menunjukkan bahwa organisasi perempuan mampu menjadi sarana advokasi dan pemberdayaan kader perempuan dalam proses rekrutmen politik serta	Penelitian lebih berfokus pada proses rekrutmen dan pencalonan legislatif. Penelitian ini belum membahas keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan

			memperluas peluang perempuan untuk masuk ke arena politik formal.	strategis di tingkat Dewan Pimpinan Pusat partai politik.
--	--	--	---	---

Sumber: hasil olahan penelitian, tahun 2026

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji keterwakilan perempuan secara kuantitatif, seperti tingkat pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif dan partai politik, serta tantangan kebijakan afirmasi (affirmative action) secara umum di Indonesia. (M. Siregar, 2021) Mereka lebih menyoroti hambatan struktural seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan hambatan sosial yang menghalangi perempuan mencapai posisi strategis. Misalnya, jurnal Siregar (2021) dan Hidayati (2020) berfokus pada gambaran nasional terkait kebijakan kuota dan problematika keterlibatan perempuan di legislatif secara umum, tanpa mengkaji secara khusus dinamika representasi substantif perempuan dalam pengambilan keputusan internal partai tertentu.

Berdasarkan tinjauan Pustaka diatas, terlihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas perempuan dari sisi keterwakilan, hambatan partisipasi politik, komunikasi politik, maupun rekrutmen kader. Sementara itu, kajian mengenai representasi substantif perempuan yang menekankan pada kemampuan perempuan untuk memengaruhi arah kebijakan dan keputusan organisasi masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan keterwakilan perempuan tidak hanya dapat diukur dari banyaknya perempuan yang menduduki jabatan politik, tetapi juga dari sejauh mana mereka memiliki ruang, akses, dan pengaruh dalam menentukan keputusan strategis.

Selain itu, hingga saat ini masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji representasi substantif perempuan dalam proses pengambilan keputusan internal partai politik pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Padahal, DPP merupakan pusat pengambilan keputusan yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, strategi politik, serta berbagai keputusan organisasi partai. Oleh karena itu, memahami posisi dan pengaruh perempuan dalam forum-

forum strategis di tingkat DPP menjadi penting untuk melihat apakah keterlibatan perempuan telah mencapai tingkat representasi substantif atau masih sebatas representasi formal.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang belum banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya dengan memfokuskan perhatian pada representasi substantif perempuan dalam pengambilan keputusan internal DPP Partai NasDem tahun 2024. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan perempuan dalam struktur kepengurusan partai, tetapi juga menganalisis sejauh mana perempuan berperan dalam penyampaian aspirasi, proses perumusan kebijakan, pembentukan keputusan strategis, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas keterlibatan mereka dalam lingkungan internal partai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas keterwakilan perempuan dalam partai politik, khususnya pada tingkat DPP Partai NasDem pasca Pemilu 2024.

1.7 Landasan Teoritik

1.7.1 Teori Representasi

Dalam perkembangan kajian ilmu politik, teori representasi yang dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin menjadi salah satu landasan penting Teori representasi yang dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin dalam buku *The Concept of Representation* (1967) merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam studi representasi politik. Menurut Pitkin, representasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan seseorang dalam suatu lembaga politik, tetapi juga berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh wakil tersebut dalam memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Pitkin menyatakan bahwa *“representation is no longer a question of who the representative is, but of what he does and how he does it”* (Pitkin, 1967). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa representasi tidak cukup dipahami sebagai kehadiran fisik seseorang dalam struktur politik, tetapi juga harus dilihat dari peran dan pengaruh yang dimilikinya dalam proses politik. (Pitkin, 1967).

Bagi Pitkin, inti representasi ada pada tindakan wakil dalam membawa dan memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakili. Jadi, representasi bukan cuma soal “siapa yang ada di dalam struktur”, tetapi juga soal “apa yang benar-benar dilakukan” oleh orang yang ada di dalam struktur itu (Pitkin, 1967). Dalam teorinya, Pitkin membedakan representasi ke dalam beberapa bentuk, namun penelitian ini memfokuskan pada dua dimensi utama yaitu representasi deskriptif (*descriptive representation*) dan representasi substantif (*substantive representation*) (Pitkin, 1967),

1. Representasi Deskriptif

Merujuk pada tingkat kesamaan karakteristik antara wakil dan kelompok yang diwakili. Dalam konteks politik perempuan, representasi deskriptif menunjukkan keberadaan perempuan dalam struktur organisasi politik dan posisi yang mereka tempati dalam lembaga tersebut. Kehadiran perempuan dalam struktur kepengurusan partai menjadi indikator awal adanya keterwakilan perempuan dalam organisasi politik. Oleh karena itu, representasi deskriptif dalam penelitian ini dianalisis melalui keberadaan perempuan dalam struktur kepengurusan DPP Partai NasDem, keterlibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan strategis, serta akses perempuan terhadap jabatan strategis dalam organisasi partai.

Menurut Pitkin (1967), keberadaan perempuan dalam struktur organisasi belum tentu menunjukkan bahwa kepentingan perempuan telah terwakili. Oleh sebab itu, representasi deskriptif perlu dilengkapi dengan representasi substantif. Representasi substantif menekankan tindakan nyata wakil dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya. Dalam konteks penelitian ini, representasi substantif tidak hanya dilihat dari keberadaan perempuan dalam kepengurusan DPP Partai NasDem, tetapi juga dari kemampuan perempuan untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi keputusan partai, terlibat dalam proses perumusan kebijakan, serta memastikan kepentingan perempuan terakomodasi dalam kebijakan organisasi.

2. Representasi Substantif

Menjadi penting karena keterwakilan perempuan yang hanya bersifat formal belum tentu menghasilkan perubahan dalam proses pengambilan keputusan. Pitkin menekankan bahwa kualitas representasi dapat dilihat dari sejauh mana wakil mampu bertindak atas nama kelompok yang diwakilinya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis apakah perempuan di DPP Partai NasDem Tahun 2024 hanya hadir sebagai bagian dari struktur organisasi atau telah berperan sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan partai.

Berdasarkan teori Hanna Pitkin tersebut, penelitian ini menggunakan dua dimensi utama yaitu representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif diturunkan ke dalam indikator kehadiran perempuan dalam struktur kepengurusan, keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan, dan akses perempuan terhadap jabatan strategis. Sementara itu, representasi substantif diturunkan ke dalam indikator keterlibatan perempuan dalam penyampaian aspirasi, pengaruh perempuan terhadap keputusan partai, akomodasi aspirasi perempuan dalam kebijakan organisasi, serta keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dan program strategis partai.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka fokus utama bukan hanya menghitung jumlah perempuan yang duduk dalam kepengurusan DPP Partai NasDem tahun 2024. Penelitian ini berupaya melihat lebih jauh apakah perempuan yang berada dalam struktur tersebut benar-benar memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, memengaruhi arah kebijakan, serta ikut menentukan keputusan strategis partai. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya perempuan dalam kepengurusan, melainkan berusaha memahami kualitas keterlibatan perempuan dalam proses politik internal partai.

Selain itu, Pitkin juga menekankan bahwa representasi yang baik harus mampu menciptakan hubungan antara wakil dan kepentingan yang diwakili. Dalam konteks perempuan, hal ini berarti bahwa perempuan yang menduduki posisi strategis dalam partai diharapkan tidak hanya menjadi simbol keterwakilan, tetapi

juga mampu membawa perspektif, kebutuhan, dan pengalaman perempuan ke dalam proses perumusan kebijakan. Kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting karena perempuan sering kali memiliki pengalaman sosial yang berbeda dengan laki-laki sehingga dapat memberikan sudut pandang yang lebih beragam dalam proses penyusunan kebijakan partai.

Melalui perspektif Pitkin, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah kebijakan afirmasi yang selama ini diterapkan oleh partai politik telah menghasilkan perubahan yang bersifat substantif. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai partai politik, termasuk Partai NasDem, telah berupaya meningkatkan jumlah perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan politik. Akan tetapi, pertanyaan yang masih perlu dijawab adalah apakah peningkatan jumlah tersebut telah diikuti oleh peningkatan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari konsep representasi substantif yang dikembangkan oleh Pitkin.

Dengan demikian, teori representasi Hanna Pitkin digunakan sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan perbedaan antara keterwakilan yang bersifat formal dengan keterwakilan yang memiliki pengaruh nyata. Teori ini membantu peneliti untuk memahami apakah perempuan di DPP Partai NasDem tahun 2024 hanya hadir sebagai bagian dari struktur organisasi atau telah berperan sebagai aktor politik yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan dan keputusan strategis partai. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kualitas keterlibatan perempuan dalam politik internal partai dan sejauh mana representasi perempuan telah berkembang dari sekadar kehadiran menuju pengaruh yang substantif.

1.7.2 Teori Anne Phillips: Politics of Presence dan Politics of Ideas

Secara umum, partisipasi politik dapat dipahami sebagai keterlibatan warga negara, baik secara individu maupun kolektif, dalam berbagai kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Anne Phillips dalam *The Politics of Presence* (Phillips, 1995) menegaskan bahwa

“representasi politik tidak cukup hanya dilihat dari gagasan atau program yang dibawa, tetapi juga dari siapa yang benar-benar hadir dalam ruang pengambilan keputusan.” Ia menilai bahwa politik yang hanya mengutamakan ide sering kali kurang mampu menjawab persoalan pengecualian politik, terutama bagi kelompok yang selama ini tidak punya posisi kuat di lembaga resmi. Dari sini terlihat bahwa kehadiran perempuan dalam politik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari demokrasi yang lebih adil.

Teori ini diperkenalkan oleh Anne Phillips dalam bukunya "The Politics of Presence" yang diterbitkan pada tahun 1995. Dalam buku ini, Phillips mengatakan *"Presence without influence is mere tokenism. Women must be present in sufficient numbers so that their voices have real political effect."* (Phillips, 1995) Teori ini digunakan untuk menjelaskan pentingnya kehadiran perempuan dalam lembaga politik sekaligus bagaimana kehadiran tersebut diterjemahkan ke dalam gagasan, program, dan kebijakan yang memengaruhi proses politik. Phillips mengkritik pandangan representasi politik yang hanya berfokus pada gagasan atau kepentingan yang dibawa oleh wakil tanpa memperhatikan siapa yang sebenarnya hadir dalam ruang pengambilan keputusan. Menurut Phillips (1995), kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili, termasuk perempuan, perlu memiliki kehadiran langsung dalam lembaga politik agar pengalaman, perspektif, dan kepentingan mereka dapat terwakili secara lebih autentik.

1. *Politics of Presence*

Dimensi ini menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam struktur politik dan forum pengambilan keputusan. Menurut Phillips (1995), kehadiran perempuan bukan hanya persoalan jumlah atau pemenuhan kuota, melainkan berkaitan dengan kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik. Kehadiran perempuan dalam ruang pengambilan keputusan memungkinkan munculnya pengalaman dan perspektif yang berbeda dari kelompok laki-laki yang selama ini lebih dominan dalam politik. Oleh karena itu, semakin besar keterlibatan perempuan dalam forum strategis, semakin besar pula peluang kepentingan perempuan untuk diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

\Dalam penelitian ini, dimensi *Politics of Presence* digunakan untuk menganalisis sejauh mana perempuan memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan internal DPP Partai NasDem Tahun 2024. Dimensi ini diturunkan ke dalam beberapa indikator, yaitu kehadiran perempuan dalam ruang pengambilan keputusan, kesetaraan posisi perempuan dengan laki-laki dalam forum strategis partai, serta partisipasi perempuan dalam proses formal maupun informal yang memengaruhi arah keputusan organisasi. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk melihat apakah perempuan hanya hadir secara simbolik atau benar-benar memiliki akses yang setara terhadap proses pengambilan keputusan partai.

2. *Politics of Ideas*.

Phillips menjelaskan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga politik harus diikuti dengan kemampuan untuk membawa gagasan, perspektif, dan kepentingan yang relevan dengan kelompok yang diwakilinya. Kehadiran perempuan akan kehilangan makna apabila tidak mampu diterjemahkan ke dalam program, kebijakan, maupun agenda organisasi. Oleh karena itu, representasi yang efektif tidak hanya diukur dari siapa yang hadir, tetapi juga dari bagaimana gagasan yang dibawa mampu memengaruhi proses politik dan hasil kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks penelitian ini, *Politics of Ideas* digunakan untuk menganalisis kontribusi perempuan dalam menghasilkan gagasan, program, dan kebijakan di lingkungan DPP Partai NasDem. Dimensi ini diturunkan ke dalam indikator gagasan yang diusulkan perempuan, program yang lahir dari inisiatif perempuan, pengaruh perempuan terhadap kebijakan partai, serta implementasi kepentingan perempuan dalam kebijakan organisasi. Melalui indikator tersebut, penelitian ini berupaya melihat sejauh mana perempuan tidak hanya hadir dalam struktur partai, tetapi juga mampu menerjemahkan kehadirannya ke dalam tindakan politik yang konkret melalui gagasan dan kebijakan yang memengaruhi arah organisasi.

Menurut (Phillips, 1995), hambatan utama dalam mencapai keterwakilan substantif perempuan di politik berasal dari budaya patriarki yang telah menyelubungi masyarakat dan institusi politik. Budaya ini menciptakan

ketidaksetaraan struktural di mana laki-laki mendominasi posisi kekuasaan, sementara perempuan sering kali dianggap sebagai aktor sekunder. Selain itu, stereotip gender yang melekat secara luas mengarah pada pandangan bahwa perempuan kurang kompeten dalam bidang politik dan kepemimpinan, sehingga membatasi akses mereka ke jabatan strategis meskipun memiliki kualifikasi yang setara.

Dalam bukunya, Phillips juga mengkritik sistem meritokrasi yang diklaim sebagai proses seleksi yang adil dan objektif. Mengapa Philips tidak suka system ini Menurutnya, “meritokrasi sering kali menjadi alat bagi elit laki-laki untuk mempertahankan kekuasaan, karena kriteria “merit” yang digunakan biasanya menguntungkan pengalaman dan jaringan informal yang telah lama dikuasai oleh laki-laki.” Sebagai contoh, dalam pemilihan ketua partai. Kandidat pria mempunyai "merit" atau kemampuan pribadi dari 20 tahun *networking* di kalangan elite, sementara perempuan berprestasi tinggi tapi "hanya" 10 tahun pengalaman dikarenakan baru masuk politik ia kalah meski kompeten secara pengalaman. Dalam hal ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di DPP partai NasDem sendiri yang menunjukkan posisi strategis 100% dipegang oleh laki-laki dan perempuan masih belum bisa memegang kekuasaan sentralistik dalam struktur organisasi partai, terkhusus. Jaringan informal laki-laki yang sudah terbentuk puluhan tahun lalu (pre-1998) sulit ditembus perempuan yang baru masuk post-reformasi. Hal ini menekankan perempuan sulit naik ke posisi tinggi karena kurangnya "jaringan lama" dari lingkaran pria yang mendominasi partai atau parlemen, meskipun mereka memiliki prestasi yang sebanding (Philips, 1995).

Dalam bukunya, (Philips, 1995) menegaskan bahwa representasi politik yang adil tidak hanya soal ide atau program, tapi juga membutuhkan keterwakilan secara nyata dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan agar keputusan bisa lebih inklusif dan demokratis. Pendapat Anne Philips dengan studi kasus DPP Partai NasDem adalah bahwa meskipun kuota perempuan minimal 30% sudah dipenuhi di partai ini, tetapi tantangan terbesar menurut Anne Phillips adalah kualitas keterlibatan Perempuan. Apakah perempuan benar-benar memiliki pengaruh dan ruang dalam pengambilan keputusan strategis atau hanya menjadi representasi

simbolis. Anne Phillips melalui *The Politics of Presence* menekankan bahwa demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan politik gagasan, tetapi juga memerlukan kehadiran kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam ruang pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya dipahami sebagai pelengkap struktur politik, melainkan sebagai pihak yang membawa pengalaman sosial dan perspektif berbeda ke dalam proses perumusan kebijakan. (Phillips, 1995)

Pemikiran tersebut relevan dengan studi kasus DPP Partai NasDem 2024, karena susunan pengurus menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam beberapa bidang strategis, seperti Perempuan dan Anak, Kesehatan, UMKM, Lingkungan Hidup, Migran, serta Pembangunan dan Infrastruktur. Namun, keberadaan perempuan dalam struktur organisasi belum otomatis menunjukkan adanya pengaruh substantif dalam proses pengambilan keputusan. (partainasdem.id)

Dengan demikian, teori Anne Phillips digunakan sebagai pelengkap teori Hanna Pitkin. Jika Pitkin menjelaskan perbedaan antara representasi deskriptif dan representasi substantif, maka Phillips membantu menjelaskan bagaimana kehadiran perempuan dalam struktur organisasi politik harus diikuti oleh kemampuan untuk menghasilkan gagasan, memengaruhi kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kombinasi kedua teori tersebut, penelitian ini dapat menganalisis keterwakilan perempuan tidak hanya dari aspek jumlah dan posisi, tetapi juga dari aspek pengaruh dan kontribusi nyata perempuan dalam pengambilan keputusan internal DPP Partai NasDem Tahun 2024.

1.7.3 Teori Elit (Robert Michels)

Sebagai teori pendukung, penelitian ini menggunakan Teori Elit yang dikemukakan oleh Robert Michels dalam karya klasiknya *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy* (1911). Melalui konsep *Iron Law of Oligarchy* atau Hukum Besi Oligarki, Michels berpendapat bahwa setiap organisasi yang semakin besar dan kompleks akan cenderung mengalami konsentrasi kekuasaan pada sekelompok kecil elit. Menurut

Michels, meskipun organisasi politik dibangun atas prinsip demokrasi, dalam praktiknya pengambilan keputusan sering kali berada di tangan segelintir orang yang memiliki posisi strategis, pengalaman, sumber daya, dan akses terhadap informasi organisasi.

Michels menyatakan bahwa “*who says organization, says oligarchy*,” yang menunjukkan bahwa organisasi besar hampir selalu melahirkan pemusatan kekuasaan. Dalam konteks partai politik, hal ini berarti keputusan penting tidak selalu diambil secara merata oleh seluruh anggota, melainkan lebih banyak ditentukan oleh elite yang memiliki akses terhadap informasi dan strategi. (Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, 1915)

Menurut Michels, proses oligarkisasi ini didorong oleh kebutuhan organisasi akan kepemimpinan yang terspesialisasi dan profesional. Seiring dengan berkembangnya kompleksitas organisasi, diperlukan individu-individu yang memiliki keahlian khusus dalam mengelola administrasi, strategi, dan komunikasi. Para pemimpin ini kemudian mengonsolidasikan kekuasaan mereka melalui kontrol ketat terhadap arus informasi dan mekanisme internal partai. Dalam teori ini relevan untuk menganalisis peran perempuan di DPP Partai NasDem 2024 karena kehadiran perempuan dalam struktur partai belum tentu menunjukkan keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan.

Bisa saja perempuan sudah menempati posisi formal, tetapi keputusan strategis tetap didominasi oleh elite lama yang menguasai pusat kekuasaan partai. Dengan demikian, pemikiran Michels membantu melihat apakah perempuan hanya menjadi bagian dari struktur administratif atau benar-benar memiliki pengaruh dalam arah kebijakan internal partai. Michels melihat bahwa kekuasaan cenderung menetap pada tangan mereka yang berada di struktur tertinggi, yang kemudian membentuk lingkaran elit yang sulit ditembus oleh mereka yang berada di luar lingkaran tersebut. Hal ini menyebabkan keputusan-keputusan strategis partai sering kali lahir dari kesepakatan-kesepakatan internal di tingkat elit, yang sering kali mengabaikan partisipasi substansial dari anggota di level bawah atau kelompok yang secara struktural belum memiliki posisi tawar yang kuat.

Berdasarkan konsep Iron Law of Oligarchy, penelitian ini menggunakan empat indikator, yaitu pengaruh elit partai terhadap keputusan, akses perempuan ke lingkaran inti kekuasaan, hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta strategi perempuan dalam menghadapi dominasi elit partai. Keempat indikator tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara struktur kekuasaan partai dengan tingkat pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan internal DPP Partai NasDem Tahun 2024. (Michels R. , 1915)

1.7.4 Konsep Kebijakan Affirmative Action

Kuota perempuan adalah ketentuan yang mewajibkan partai politik untuk mengalokasikan minimal 30% posisi bagi perempuan dalam daftar calon legislatif maupun struktur organisasi partai. Sebagai ilustrasi, dari 10 kursi yang tersedia, setidaknya 3 harus diisi oleh perempuan. Kebijakan kuota 30% merupakan bentuk affirmative action yang bertujuan untuk mempercepat keterwakilan perempuan di bidang politik. Kemampuan ini tidak hanya terbatas pada partai politik semata, melainkan meluas ke berbagai tingkatan pemerintahan dan proses pemilu di Indonesia. Tujuannya adalah memastikan perempuan memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi aktif dalam politik, bukan sekadar sebagai pengamat.

Dalam sistem pemilu di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adanya ketentuan ini berarti daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen setiap dapil, sehingga setiap tiga orang, paling sedikit satu orang bakal calon perempuan. Kuota ini diwajibkan oleh undang-undang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan nyata untuk duduk di parlemen atau posisi politik lain. Sebagai contoh, pada 2019 NasDem menunjukkan capaian perempuan terpilih sekitar 32,2% dari kursi NasDem dan pada 2024 turun sedikit menjadi 30,4%, tetapi tetap memenuhi atau mendekati ambang 30% di kursi.

Berbagai undang-undang mengatur ketentuan ini secara mendalam agar implementasinya terstruktur. Berikut rinciannya:

1. Partai Politik: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mensyaratkan keterwakilan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan pusat partai.
2. Calon Legislatif (DPR/DPRD): Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon per daerah pemilihan (dapil), dengan ketentuan setiap tiga nama minimal satu perempuan. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 memperkuat hal ini untuk daftar bakal calon.
3. Penyelenggara Pemilu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panitia adhoc mempertimbangkan keterwakilan 30% perempuan.
4. Pemerintahan Daerah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mewajibkan partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan proses perencanaan daerah.
5. Pemerintahan Desa: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan musyawarah desa.
6. Hak Politik Dasar: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin kesetaraan hak politik bagi perempuan.
7. Ruang Publik yang Aman: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi perempuan di lembaga publik, termasuk partai politik. (Hidayah, 2025)

Pada Struktur Dewan pimpinan pusat (DPP) Data SK kepengurusan NasDem 2024 yang tercatat di KPU menunjukkan presentase 30,14 % perempuan, yang terdiri dari total pengurus pusat 73 orang, serta pengurus Perempuan terdiri dari 22 orang di DPP pusat menurut data (KPU, 2024). Mayoritas struktur kepengurusan DPP NasDem masih didominasi oleh laki-laki (sekitar 69,86 %) dibanding perempuan (30,14 %). Dengan kata lain, meskipun secara angka partai sudah mendekati atau memenuhi ketentuan kuota perempuan, mayoritas posisi tetap dipegang oleh laki-laki, khususnya di posisi yang sering menentukan arah

kebijakan dan pengambilan keputusan partai. Seperti yang sudah dikatakan dalam UU Partai Politik (UU 2/2011 menganjurkan memperhatikan minimal 30% perempuan di kepengurusan pusat).

Dalam hal ini NasDem relatif lebih sukses pada ‘output legislatif’ (perempuan terpilih) dibandingkan ‘ruang kekuasaan internal’ (struktur DPP pusat). Karena itu, negara dan partai politik juga harus memberikan dukungan lebih, seperti pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, dan membangun jaringan perempuan agar mereka lebih percaya diri dan kompeten untuk mengambil keputusan penting. Jadi, kuota ini adalah langkah awal, tapi yang paling penting adalah memastikan perempuan punya peran dan suara yang nyata dalam politik, bukan sekadar sebagai pemenuhan formalitas.

Oleh karena itu, negara dan partai politik perlu menyediakan dukungan substansial, yaitu sebagai berikut Pelatihan kepemimpinan dan kapasitas, seperti program workshop advokasi kebijakan dan manajemen organisasi yang dirancang khusus untuk perempuan kader. Pendidikan politik berkelanjutan, melalui sekolah partai atau kolaborasi dengan lembaga seperti KPU dan Bawaslu untuk membekali pengetahuan electoral dan governance. Dan Pembangunan jaringan perempuan, berupa forum lintas partai, mentoring antar-anggota senior-junior, dan akses dana khusus untuk kampanye perempuan agar meningkatkan kepercayaan diri serta kompetensi dalam mengambil keputusan krusial.

Pada akhirnya, kuota perempuan hanya merupakan langkah awal yang bersifat prosedural; keberhasilan sejati tercermin dari jaminan peran substantif dan suara nyata bagi perempuan dalam dinamika politik, bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif yang rentan terhadap manipulasi nominal. Transformasi ini memerlukan komitmen berkelanjutan dari elite partai untuk mengubah kuota menjadi agen perubahan struktural (Irfandi1, 2024).

1.8 Alur Pemikiran

Alur berpikir penelitian ini menggambarkan langkah-langkah logis yang saling terhubung. Langkah-langkah tersebut membentuk pemahaman mendalam tentang peran perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan internal DPP

Partai NasDem tahun 2024. Penelitian ini dimulai dari masalah utama, yaitu partisipasi perempuan yang rendah secara nyata di partai politik Indonesia. Meskipun keterlibatan formal mereka tinggi, seperti di Partai NasDem, peran substantif sering terbatas. Hal ini menghubungkan langsung ke judul, di mana fokusnya adalah bagaimana perempuan berkontribusi pada kebijakan internal DPP NasDem 2024, seperti keputusan rekrutmen atau agenda gender. Masalah ini menjadi fondasi kuat untuk langkah berikutnya, yaitu penetapan tujuan yang jelas.

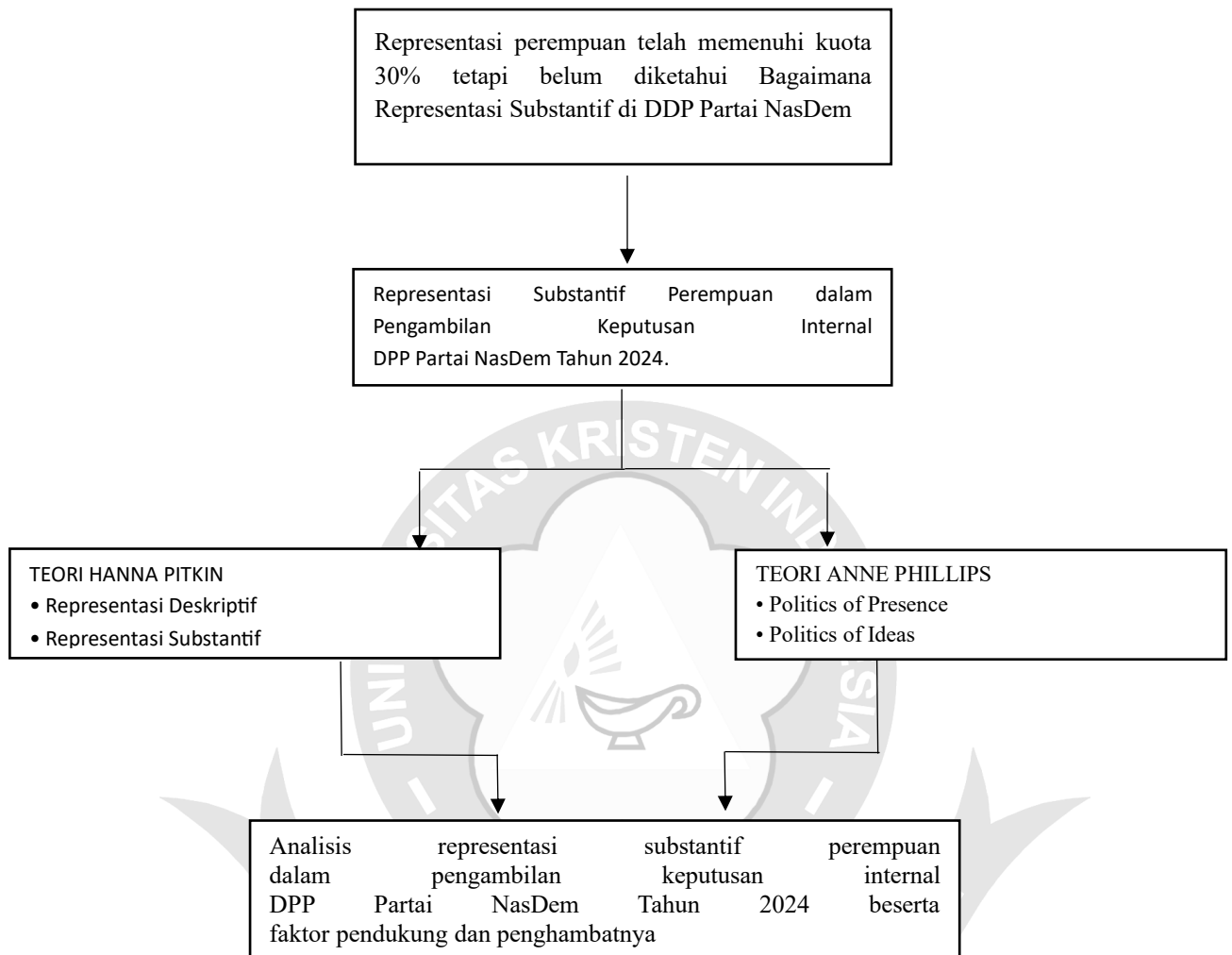
Tujuan utama adalah menganalisis peran perempuan di DPP NasDem serta dampak strategi kaderisasi partai terhadap keterlibatan mereka. Secara spesifik, penelitian mengeksplorasi bagaimana perempuan memengaruhi kebijakan internal pada 2024, termasuk program pelatihan atau kuota gender. Tujuan ini menjembatani masalah awal dengan kerangka teoritis yang mendukung analisis lebih dalam. Dengan tujuan terdefinisi, penelitian lanjut ke landasan teori untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah.

Kerangka ini menggunakan teori partisipasi politik dari Anne Phillips dan teori Representasi Hanna Pitkin dan Teori elit Mitchell. Teori tersebut mengurai faktor struktural seperti budaya patriarki, dominasi elit pria, dan hambatan sistemik yang membatasi perempuan. Kaitannya dengan judul terlihat jelas: teori membantu menganalisis proses pengambilan keputusan di DPP NasDem 2024, misalnya bagaimana patriarki menghalangi suara perempuan dalam rapat kebijakan internal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mendalam untuk menggali hal-hal yang sulit terlihat. Data utama dikumpul lewat wawancara dengan orang-orang kunci di partai, pengamatan langsung saat acara partai, serta pemeriksaan dokumen dalam DPP NasDem seperti laporan pelatihan kader. Cara ini sangat relevan untuk menemukan

dinamika tersembunyi di tahun 2024, misalnya bagaimana perempuan bernegosiasi dalam rapat kebijakan internal. Serta dari hasil data yang terkumpul dicek ulang untuk pastikan akurat sebelum dianalisis. Langkah ini menghubungkan pengumpulan data dengan proses pengolahan, sehingga informasi mentah berubah jadi temuan yang berguna.

Tabel 3 Bagan Alur Berpikir



Sumber: Hasil olahan peneliti, tahun 2026

1.9 Metode Penelitian

Istilah metodologi penelitian terdiri dari dua kata utama, yaitu metodologi dan penelitian. Kata metodologi berarti cara atau langkah-langkah yang teratur dan sistematis dalam melakukan kegiatan ilmiah. Sementara itu, penelitian adalah proses mencari tahu sesuatu secara rapi dan teliti untuk mendapatkan fakta atau pengetahuan baru lewat pengumpulan serta analisis data yang adil dan obyektif.

Penjelasan ini sejalan dengan pendapat, (Nazir, 1988) yang menjelaskan bahwa penelitian merupakan proses penyelidikan yang dilakukan secara cermat dan kritis dengan tujuan menemukan fakta, prinsip, atau hubungan baru guna memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap suatu fenomena. Metodologi penelitian, dengan demikian, berfungsi sebagai kerangka kerja ilmiah yang mengarahkan peneliti dalam menentukan prosedur, teknik, dan langkah-langkah penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai seperangkat prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data secara sistematis, objektif, dan terukur, guna mencapai tujuan penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Menurut (Arikunto, 2010) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya memahami secara mendalam peran dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik di DPP Partai NasDem tahun 2019. Pendekatan ini sesuai untuk menggali fenomena sosial, dinamika internal partai, dan pengalaman perempuan secara kontekstual. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan mendeskripsikan struktur organisasi, strategi kaderisasi, serta hasil wawancara mengenai tantangan perempuan di DPP NasDem pasca-Pemilu 2024.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam peran perempuan dalam mendorong pengambilan keputusan di DPP Partai NasDem, terutama terkait hambatan budaya patriarki, stereotip gender, dan strategi pemberdayaan perempuan dalam partai. Metode

kualitatif ini tidak menitikberatkan pada data statistik, melainkan mengeksplorasi makna, proses, dan dinamika komunikasi serta politik di lingkungan partai melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi.

1.9.2 Desain penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh proses penelitian. Desain penelitian berfungsi untuk memberikan arah yang jelas dan sistematis kepada peneliti agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara terstruktur, terencana, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya desain penelitian, peneliti dapat menentukan langkah-langkah penelitian secara runtut mulai dari pengumpulan data hingga analisis data.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam karakteristik, kondisi, serta fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap objek yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan fakta dan data empiris yang ada.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai Representasi Substantif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Internal DPP Partai NasDem 2024. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah perempuan sudah erlibat dan berperan dalam struktur serta mekanisme pengambilan keputusan partai.

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan secara rinci kondisi keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural dan fungsional di DPP Partai NasDem, termasuk bentuk partisipasi perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan strategis partai. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran perempuan, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun institusional, dalam pengambilan keputusan politik internal partai. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan

internal Partai NasDem, struktur organisasi DPP, pembagian peran berdasarkan gender, serta praktik pengambilan keputusan yang berlangsung pada periode tahun 2024.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan guna mendukung analisis mengenai Representasi Substantif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Internal DPP Partai NasDem 2024. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.9.3.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dengan responden atau informan penelitian untuk menggali informasi secara rinci dan mendalam. Wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, tergantung pada kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan secara sistematis dan terarah, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui wawancara terstruktur, peneliti dapat memperoleh data yang jelas, terfokus, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang berasal dari pengurus dan kader perempuan di DPP Partai NasDem, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik internal partai pada tahun 2024. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran perempuan dalam struktur organisasi partai, keterlibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam mempengaruhi keputusan politik strategis partai. Wawancara dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui media komunikasi lain, seperti telepon atau daring, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan informan.

1.9.3.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Representasi Substantif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Internal DPP Partai NasDem 2024*”, teknik observasi dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terencana.

Peneliti melakukan observasi terhadap dinamika internal organisasi Partai NasDem, khususnya yang berkaitan dengan pola interaksi, pembagian peran, serta keterlibatan perempuan dalam kegiatan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan DPP Partai NasDem. Selama proses observasi, peneliti mencatat berbagai hal yang terlihat dan terdengar, termasuk perilaku, interaksi antar pengurus, serta posisi perempuan dalam forum atau kegiatan strategis partai.

Setelah observasi dilakukan, peneliti menyusun catatan lapangan secara rinci dan sistematis, kemudian menganalisis data hasil observasi untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan yang relevan dengan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik internal partai. Untuk memperkuat validitas data, peneliti melakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil observasi dengan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Selain itu, dalam pelaksanaan observasi, peneliti tetap memperhatikan aspek etika penelitian, seperti memperoleh izin yang diperlukan serta menjaga kerahasiaan informasi dan identitas pihak-pihak yang terlibat. Dengan teknik observasi ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Representasi Substantif perempuan dalam pengambilan keputusan politik internal di DPP Partai NasDem.

1.9.3.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah tersedia sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian. Data dokumentasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian,

dokumen resmi partai, arsip organisasi, catatan rapat, serta media massa dan sumber internet yang kredibel.

Dalam konteks penelitian ini, data dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Partai NasDem, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem, struktur organisasi DPP Partai NasDem, keputusan-keputusan partai, laporan kegiatan, serta dokumen internal yang mencerminkan peran dan posisi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan politik pada tahun 2024. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam politik, serta data statistik mengenai keterlibatan perempuan di partai politik (NASDEM, 2019).

Pengumpulan data dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dengan memanfaatkan berbagai dokumen tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan mendetail mengenai Representasi Substantif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Internal DPP Partai NasDem 2024.

1.9.4 Informan Penelitian

Informan penelitian memegang peran yang sangat penting dalam proses penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Informan berfungsi sebagai sumber utama data dan informasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam bukunya *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, informan penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Creswell menekankan bahwa pemilihan informan yang tepat sangat menentukan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2014).

Melalui wawancara yang dilakukan dengan informan di lingkungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan struktur organisasi partai, peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik, serta dinamika internal partai yang mempengaruhi

keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Informasi yang diperoleh dari informan mencakup pandangan mengenai kebijakan internal partai, mekanisme kaderisasi, pembagian peran berdasarkan gender, serta tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam struktur kepemimpinan partai politik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kutipan langsung dari aktor-aktor politik sebagai bagian dari data pendukung. Kutipan tersebut diperoleh dari hasil wawancara mendalam maupun dari pernyataan resmi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu Representasi Substantif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Internal DPP Partai NasDem 2024. Penggunaan kutipan langsung bertujuan untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran empiris mengenai realitas yang terjadi di internal partai.

Tabel 4 Informan Penelitian

Informan	Keterangan
Amelia Anggraini	Ketua Bidang Perempuan Dan Anak
Eva Kusuma Sundari	Ketua Bidang Migran Dan Kesehatan
Lathifah Anshori	Ketua Bidang Milenial dan Pemilih Pemula

(Sumber: Olahan Penulis, 2026)

Informan diatas Adalah narasumber kunci dalam penelitian ini meliputi Eva Sundari (Juru Bicara Anies Baswedan dari Partai NasDem) sekaligus Ketua Bidang Migrasi dan Kesehatan DPP NasDem, Amelia Anggraini (Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP NasDem sekaligus Anggota Komisi I DPR RI), serta Latifah Anshori (Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP NasDem). Alasan pemilihan ketiga informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Representasi Substantif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Internal DPP Partai NasDem Tahun 2024.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh berbentuk kata-kata, narasi, atau teks, bukan angka. Data ini bisa berasal dari wawancara, observasi, maupun dokumen, dan kemudian dicatat, direkam, atau diketik agar siap dianalisis. Analisis kualitatif fokus pada memahami makna dan pola dari data yang diperoleh, bukan menghitung angka. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut (Huberman, 1994). Analisis ini terdiri dari tiga tahap utama, yang dilakukan secara simultan dan saling mendukung: (Adam1, 2022)

1. **Reduksi Data (Data Reduction)** Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, serta merangkum informasi penting yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. **Penyajian Data (Data Display)** Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, serta temuan yang muncul dari hasil penelitian.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.** Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data agar hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang baik.

1.9.6 Instrumen Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen ini penting karena kualitas data sangat bergantung pada keandalan dan validitas alat yang digunakan. Instrumen penelitian dapat berupa wawancara, observasi, dokumen, maupun kuesioner, tergantung jenis penelitian.

Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan berupa wawancara mendalam dan dokumen terkait internal DPP Partai NasDem. Wawancara digunakan untuk menggali Representasi Substantif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan DPP Partai NasDem 2024, sedangkan dokumen digunakan untuk memverifikasi data dan mendapatkan informasi tambahan terkait struktur organisasi dan mekanisme pengambilan Keputusan partai.

Tabel 5 Instrumen penelitian

Konsep/Teori	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan Wawancara	Informan
Teori Representasi Hanna Pitkin (1967) (Pitkin, 1967)	Representasi Deskriptif	Kehadiran perempuan dalam struktur kepengurusan DPP	Bagaimana posisi dan peran perempuan dalam struktur DPP Partai NasDem Tahun 2024?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Keterwakilan perempuan dalam forum pengambilan keputusan	Apakah perempuan terlibat dalam rapat pleno, Rakernas, dan forum strategis partai?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Akses perempuan terhadap jabatan strategis	Menurut Ibu, apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis di DPP Partai NasDem?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori

Teori Representasi Hanna Pitkin (1967)	Representasi Substantif	Keterlibatan perempuan dalam penyampaian aspirasi	Bagaimana perempuan menyampaikan pendapat atau usulan dalam rapat-rapat internal partai?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Pengaruh perempuan terhadap keputusan partai	Apakah pendapat yang disampaikan perempuan pernah memengaruhi keputusan strategis partai? Dapatkah Ibu memberikan contohnya?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Akomodasi aspirasi perempuan	Bagaimana mekanisme partai memastikan aspirasi perempuan benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Keterlibatan dalam	Sejauh mana perempuan dilibatkan dalam penyusunan	Ketua Bidang

		perumusan kebijakan	kebijakan atau program strategis partai?	DPP NasDem
	Kapasitas dan Pengaruh Politik	Penguatan posisi melalui jabatan legislatif	Apakah posisi Ibu sebagai anggota DPR RI memengaruhi kapasitas advokasi dan ruang gerak Ibu dalam menentukan kebijakan internal partai?	Amelia Anggraini
		Pengaruh terhadap kebijakan partai	Apakah terdapat perubahan dalam cara Ibu merespons dan memengaruhi kebijakan partai setelah memiliki mandat legislatif?	Amelia Anggraini
		Advokasi kepentingan perempuan	Bagaimana cara konkret yang Ibu lakukan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam forum pengambilan keputusan DPP?	Amelia Anggraini
Anne Phillips (1995)	Politics of Presence (Kehadiran)	Kehadiran perempuan dalam ruang pengambilan keputusan	Apakah keberadaan perempuan dalam kepengurusan DPP sudah memberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori

			pengambilan keputusan?	
		Kesetaraan posisi perempuan dengan laki-laki	Bagaimana partai memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam forum-forum strategis?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Partisipasi perempuan dalam proses informal	Selain forum resmi, apakah perempuan juga dilibatkan dalam diskusi informal yang memengaruhi keputusan partai?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
Anne Phillips (1995)	Politics of Ideas (Gagasan, Program, dan Kebijakan)	Gagasan yang diusulkan perempuan	Apakah terdapat gagasan atau usulan yang berasal dari pengurus perempuan dan kemudian menjadi program partai?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Program yang lahir dari inisiatif perempuan	Program apa saja yang lahir dari inisiatif perempuan di DPP Partai NasDem?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Pengaruh perempuan	Apakah terdapat kebijakan internal	Amelia Anggraini

		terhadap kebijakan	partai yang merupakan hasil advokasi atau desakan pengurus perempuan?	Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Implementasi kepentingan perempuan dalam kebijakan	Bagaimana perempuan memastikan isu perempuan dan anak masuk dalam agenda kebijakan partai?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
Robert Michels (1911) - Teori Pendukung	Dominasi Elit dan Struktur Kekuasaan	Pengaruh elit partai terhadap keputusan	Siapa yang paling menentukan keputusan strategis dalam DPP Partai NasDem?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Akses perempuan ke lingkaran inti kekuasaan	Apakah perempuan memiliki akses yang sama terhadap kelompok elit pengambil keputusan partai?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori
		Hambatan struktural	Apa hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam memengaruhi keputusan strategis partai?	Amelia Anggraini Eva Kusuma Sundari Lathifah Anshori

		Strategi perempuan menghadapi dominasi elit	Bagaimana strategi perempuan agar tetap memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan partai?	Ketua Bidang DPP NasDem
--	--	---	---	-------------------------

(Sumber: Olahan Penulis, 2026)

1.10 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tetap terfokus dan terarah pada fenomena yang diteliti, diperlukan perumusan pokok-pokok inti dalam setiap bab. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika penulisan secara terstruktur guna memastikan bahwa setiap bagian mencakup aspek-aspek penting yang mendukung pembahasan utama, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai dasar dan arah penelitian yang dilakukan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya dalam proses pengambilan keputusan di partai politik. Selain itu, dibahas pula fenomena keterwakilan perempuan di Partai NasDem serta alasan pemilihan DPP Partai NasDem sebagai lokasi penelitian. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang berfokus pada representasi substantif perempuan dalam pengambilan keputusan internal DPP Partai NasDem Tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses tersebut. Selanjutnya dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM DPP PARTAI NASDEM

Bab ini membahas gambaran umum mengenai DPP Partai NasDem sebagai objek penelitian. Uraian dalam bab ini meliputi sejarah berdirinya Partai NasDem, visi, misi, ideologi, serta perkembangan organisasi partai. Selain itu, dijelaskan struktur organisasi DPP Partai NasDem, termasuk posisi dan kedudukan perempuan dalam kepengurusan partai. Bab ini juga menguraikan

komposisi keterwakilan perempuan dalam struktur DPP Partai NasDem Tahun 2024 serta peran perempuan dalam berbagai bidang organisasi. Pembahasan mengenai budaya organisasi, pola kepemimpinan, dan dinamika internal partai turut disajikan untuk memberikan gambaran mengenai konteks politik dan organisasi yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan internal partai.

BAB III: KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL DPP PARTAI NASDEM 2024.

Bab ini membahas bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi dan forum pengambilan keputusan internal DPP Partai NasDem Tahun 2024. Pembahasan meliputi posisi perempuan dalam kepengurusan partai, partisipasi perempuan dalam rapat dan forum strategis, serta keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan dan program organisasi. Selain itu, bab ini menguraikan berbagai upaya partai dalam meningkatkan kapasitas kader perempuan melalui program kaderisasi, pendidikan politik, dan pengembangan kepemimpinan perempuan, termasuk melalui Akademi Perempuan NasDem. Uraian dalam bab ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana perempuan memperoleh ruang partisipasi dalam struktur dan mekanisme pengambilan keputusan internal partai.

BAB IV: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEREMPUAN AGAR TERLIBAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL DPP NASDEM 2024. (HASIL WAWANCARA)

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil wawancara, observasi, dan analisis data lapangan. Pada bab ini dianalisis representasi substantif perempuan dalam pengambilan keputusan internal DPP Partai NasDem Tahun 2024 berdasarkan teori representasi substantif dan representasi deskriptif dari Hanna Pitkin. Analisis difokuskan pada sejauh mana perempuan tidak hanya hadir dalam struktur organisasi, tetapi juga memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan strategis partai.

Selain itu, bab ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan internal partai. Faktor-faktor tersebut meliputi posisi perempuan dalam struktur organisasi, akses terhadap jabatan strategis, keberanian dalam menyampaikan pendapat, dukungan dari pimpinan partai, budaya organisasi, serta berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam proses politik internal partai. Analisis juga mengkaji pengalaman perempuan dalam menghadapi tantangan, stereotip gender, dan dinamika kekuasaan yang berkembang di lingkungan partai politik. Seluruh temuan dianalisis menggunakan teori Hanna Pitkin untuk melihat bentuk representasi perempuan yang terjadi, serta didukung oleh teori Anne Phillips mengenai politics of presence dan teori oligarki Robert Michels untuk menjelaskan dinamika kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan internal partai.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan difokuskan pada jawaban atas rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana representasi substantif perempuan dalam pengambilan keputusan internal DPP Partai NasDem Tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada DPP Partai NasDem, pemerintah, dan partai politik di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat representasi substantif perempuan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik secara lebih efektif dan berkelanjutan.